

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah sebuah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang dihasilkan masing-masing instansi atau unit akan dijadikan dasar dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah (Erlina dkk, 2015).

Menurut Nordiawan & Hertianti (2011) laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah diterapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta laporan keuangan ini juga dapat digunakan untuk membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan dimana hal ini bermanfaat bagi para

pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara khusus dijelaskan bahwa tujuan laporan keuangan yakni menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan guna menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang telah dipercayakan kepada entitas tersebut.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memiliki tujuan umum guna memenuhi kebutuhan informasi dari segala kelompok pengguna, baik untuk manajemen entitas tersebut maupun bagi para penilai atau pengguna laporan keuangan seperti masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman serta pemerintah daerah.

2.1.1.1.Laporan Keuangan Pemerintah

Dalam buku akuntansi sektor publik Nordiawan & Hertianti (2011), laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga komponen laporan keuangan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan (*statutory reports*).

Dalam struktur pemerintah daerah, satuan kerja pemerintah daerah merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan

pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dalam satuan kerja tersebut. Kegiatan akuntansi dalam satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan dan para perbendahara dan di bantu oleh verifikator atau petugas akuntansi yang tersedia dalam satuan kerja tersebut.

Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh seluruh pengguna anggaran, dimana selanjutnya laporan tersebut akan dikonsolidasikan oleh PPKD menjadi laporan keuangan pemerintah Kota/Kabupaten/Provinsi. Setiap instansi pemerintah baik berbentuk UPT maupun entitas lainnya yang telah diwajibkan menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara umum setiap instansi harus membuat beberapa laporan keuangan utama seperti: 1) Laporan realisasi anggaran; 2) Neraca; 3) Laporan arus kas dan; 4) Catatan atas laporan keuangan. Setiap instansi membuat laporan keuangan minimal satu tahun sekali.

Setiap entitas pelaporan memiliki kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dan menyampaikan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan yang telah rencanakan secara terstruktur dan sistematis pada suatu periode pelaporan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 yaitu:

1) Akuntabilitas

Setiap entitas pelapor bertanggungjawab atas pengelolaan sumber dayanya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2) Manajemen

Membantu para pengguna sebagai bahan evaluasi kinerja dan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. Sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dan khalayak umum.

4) Keseimbangan AntarGenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai pengeluaran yang telah dialokasikan dan memastikan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung biaya pengeluaran tersebut.

5) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Puskesmas merupakan suatu instansi pemerintah yang menjalankan praktik bisnis secara BLUD, dimana puskesmas ini merupakan instansi pemberi layanan kesehatan yang tidak bertujuan mencari laba. Sehingga apabila dalam kegiatannya memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut diinvestasikan kembali untuk meningkatkan mutu pelayanan. Puskesmas sebagai pengguna anggaran dari pemda oleh karenanya diwajibkan untuk melaporkan setiap kegiatannya dan membuat laporan keuangan setiap semesternya dan dilaporkan kepada pemerintah daerah dan inspektorat untuk dilakukan pengauditan laporan keuangan (SAP Pernyataan Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU).

2.1.1.2. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut Erlina, dkk(2015) merupakan informasi yang penting bagi para penggunanya, terutama dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat apabila informasi yang terkandung didalamnya dapat digunakan untuk memprediksi kejadian masa yang akan datang yakni melalui suatu proses perbandingan, evaluasi dan analisis *trend*. Hasil analisis ini akan membantu analis dalam menginterpretasikan berbagai pengaruh yang terkait dengan laporan keuangan, serta dapat dijadikan dasar dalam menilai keberhasilan suatu instansi di masa datang.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan guna melaksanakan program kerja pemerintah, penilaian terhadap kondisi keuangan, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu entitas. Selain itu pula laporan keuangan juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan dan dalam susunan laporan keuangan yang telah dibuat, dapat dilihat seberapa besar suatu entitas taat akan perundang-undangan yang berlaku.

Karakteristik kualitas laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan laporan keuangan. Agar dapat memenuhi suatu tujuan yang diinginkan, laporan keuangan pemerintah, satuan kerja dan instansi dibawah pemerintah harus memenuhi empat karakteristik sebagai berikut:

1) Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang dimuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, dan menegaskan atau mengoreksi

hasil evaluasi yang telah dilakukan. selain itu relevan juga berarti laporan harus disajikan tepat waktu dan lengkap.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dalam pengertian yang menyesatkan dan tidak material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Penggunaan informasi yang relevan, tetapi penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka dapat disimpulkan bahwa informasi dalam laporan keuangan tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang ada dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya atau dapat juga dibandingkan dengan laporan keuangan pada entitas lain yang serupa.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh para penggunanya dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para penggunanya. Dalam hal ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi laporan keuangan.

2.1.2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dalam sebuah organisasi ataupun instansi terdiri dari orang-orang dengan berbagai peran yang telah diberikan secara formal yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan organisasi (Dessler, 2015).

Sumber daya manusia adalah semua orang yang berkontribusi untuk melakukan pekerjaan suatu instansi dan juga orang-orang yang dapat berkontribusi di masa mendatang, dan mereka yang berkontribusi di masa lalu. Sumber daya manusia dipandang sebagai aset yang harus dikelola dan diberdayakan secara hati-hati dan sejalan dengan kebutuhan instansi (Jackson dkk, 2010).

Menurut Hasibuhan (2013) perencanaan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan baik dan benar apabila perencanaannya mengetahui apa dan bagaimana sumber daya manusia itu dibutuhkan. Untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan fungsi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya manusia. Tanggungjawab dari sumber daya manusia yang baik dapat dilihat dari tanggungjawab atas deskripsi jabatan yang diembannya. Sedangkan kompetensi SDM dapat dinilai dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, ketrampilan dan pemahaman atas standar dan peraturan yang berlaku.

Instansi yang baik mengerti bahwa pengelolaan sumber daya manusia sangatlah penting dan sangat berpengaruh terhadap tujuan instansi yang akan dicapai. Sumber daya manusia yang tepat dalam

sebuah organisasi akan mempercepat tujuan suatu instansi tercapai. Kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia dapat dijadikan modal utama untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja sesuai bidang ilmu yang dimiliki secara memadai.

Fenomena yang ada dimasyarakat, sebagian besar sumber daya yang ada dalam instansi kesehatan seperti Puskesmas kebanyakan dari tenaga kesehatan. Meskipun puskesmas adalah tempat pelayanan kesehatan, akan tetapi dalam tata kelola usaha dan perbendaharaan harus disediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya. Hal ini bertujuan untuk menambah kualitas dari instansi tersebut. Dan dengan diberdayakan sumber daya manusia sesuai dengan bidang dan kemampuannya dapat memberikan manfaat yang sangat beragam seperti mempermudah dalam memahami pekerjaan. Dalam hal ini, dapat diterapkan pada Puskesmas dalam perekrutan sumber daya manusianya terlebih pada bidang tata usaha dan fungsi perbendaharaan. Dalam fungsi perbendaharaan dibutuhkan pemahaman akuntansi yang memadai agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitas laporan keuangan yang baik. Selain itu kompetensi SDM yang sesuai akan mempermudah manajemen dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya manusianya.

2.1.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perkembangan jaman menuntut setiap instansi untuk dapat mengikutinya, seperti penggunaan teknologi informasi yang tepat dan sesuai sasaran. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sebuah organisasi dapat membantu meringankan tugas-tugas yang ada. Selain itu pula dengan teknologi informasi, pengelolaan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta dengan aplikasi teknologi informasi sangat berperan penting dalam pengelolaan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi keuangan ke instansi terkait, mendorong untuk lebih cepat dan tepat dalam melakukan penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan (PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah).

Jogiyanto (2008) mengatakan penggunaan teknologi informasi oleh sebuah organisasi perlu adanya pengawasan agar sistem yang digunakan tidak terganggu. Penjagaan fasilitas teknologi dan proses komputer perlu dilakukan untuk menghindari kerusakan serta pencurian sumber daya teknologi yang tidak sah. Sedangkan menurut Laudon & Laudon (2012), teknologi informasi terdiri atas perangkat keras dan piranti lunak yang dibutuhkan instansi untuk mencapai tujuannya.

Pemerintah daerah telah memfasilitasi pengelolaan keuangan daerah dengan sistem yang memadai, sehingga dengan pemanfaatan teknologi informasi dapat mengurai kesalahan-kesalahan dalam

penyusunan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah. Dengan sistem yang telah terkomputerisasi, maka pemerintah daerah dapat dengan cepat mengakses data dari para instansi dibawahnya.

2.1.4. Budaya Kerja

Budaya Kerja (*Culture set*) secara sederhana diartikan sebagai cara pandang seseorang dalam memberi makna terhadap “kerja”. Budaya kerja telah menjadi konsep yang penting dalam memahami masyarakat dan kelompok manusia dalam jangka waktu yang lama. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2002 yang dimaksud dengan budaya kerja aparatur negara adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok aparatur negara yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Budaya kerja memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan perilaku SDM yang ada untuk meningkatkan produktivitas kerja untuk menghadapi berbagai tantangan dimasa mendatang.

Seiring dengan perkembangan dan dinamika jaman, budaya kerja mengalami reformasi dengan terwujudnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja menyebutkan bahwa budaya kerja merupakan turunan dari budaya organisasi. Budaya kerja merupakan suatu komitmen organisasi,

dalam upaya membangun sumber daya manusia, proses kerja, dan hasil kerja yang lebih baik. Pencapaian peningkatan kualitas yang lebih baik tersebut, diharapkan bersumber dari setiap individu yang terkait dalam organisasi kerja itu sendiri. Budaya kerja berkaitan erat dengan perilaku dalam menyelesaikan pekerjaan. Perilaku ini merupakan cerminan dari sikap kerja yang didasari oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dimiliki oleh setiap individu.

Pengembangan budaya kerja setiap instansi selalu diperbaruhi menuju kearah yang lebih baik. Budaya kerja sangat berpengaruh langsung dengan sumber daya manusia, dimana budaya kerja ini disusun berdasarkan nilai-nilai demokratis kemanusiaan antara lain: (a) menekankan manajemen kerjasama kelompok lebih efektif; (b) menekankan manajemen parsitipatif dan kolaboratif; (c) menekankan para perubahan budaya kerja yang kurang sesuai. Pengembangan budaya kerja memiliki manfaat yang baik bagi suatu organisasi yang mampu menerapkannya dengan baik, seperti: mempunyai dampak yang signifikan terhadap prestasi kerja organisasi dan menentukan tercapainya tujuan organisasi. Melalui budaya kerja dapat membentuk sumber daya manusia lebih kompeten dan berkualitas (BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, 2017).

Suatu budaya yang terbentuk dalam suatu organisasi terdiri atas pembentukan dimensi-dimensi kepentingan budaya individu sehingga untuk menuju kearah budaya yang positif dibutuhkan sistem pengelolaan

manajemen agar budaya yang ingin diciptakan terkendali dan terarah dengan baik, sehingga mampu mengalir secara naluri dan mempengaruhi perilaku individu dalam sebuah organisasi tersebut (Tampubolon, 2008).

Budaya kerjaberusaha menciptakan efisiensi, bebas dari kesalahan, perhatian terfokus kepada hasil dan kepentingan umum, serta kreatif dan akurat dalam menjalankan tugas. Dari hal-hal tersebut dapat disimpulkan bagaimana cara pengukuran budaya kerja yang baik adalah (1) inovatif memperhitungkan resiko, (2) memberi perhatian pada setiap masalah secara detail, (3) Berorientasi terhadap hasil yang hendak dicapai, (4) Berorientasi kepada semua kepentingan umum, (5) agresif dalam bekerja, (6) mempertahankan dan menjaga stabilitas kerja.

2.1.5. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan. SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan pemerintah melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kerja. Penerapan SAP akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan mengandung informasi yang berguna (PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah).

Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah memiliki standar tersendiri yang diatur dalam standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah pertama kali diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah pada tanggal 13 Juni 2005 dengan menggunakan basis kas. Kemudian seiring dengan kebutuhan penyusunan laporan keuangan, Penerapan SAP pada pemerintahan mengalami reformasi. Pada tanggal 22 Oktober 2010, pemerintah memperbarui SAP dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah dengan Basis Akrua. Dan penerapan SAP dengan basis akrual tersebut berlaku secara keseluruhan tahun 2015 terhadap semua instansi dibawah naungan pemerintah daerah maupun pusat sesuai dengan PP No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua.

Dasar hukum SAP adalah UU No.17 Tahun 2003 pasal 32 tentang: Bentuk dan isi LPJ pelaksanaan APBN/APBD yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar Akuntansi disusun oleh suatu komite Independen dan ditetapkan dengan PP Laporan Keuangan Pokok menurut SAP antara lain:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Arus Kas
3. Neraca
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam buletin teknis modul 1 tentang konsep dan siklus akuntansi di pemerintah daerah (2015) mengatakan bahwa standar akuntansi pemerintah yang berlaku saat ini adalah penyusunan laporan keuangan menggunakan basis akrual. Dalam *Study* Nomor 14 yang diterbitkan yang diterbitkan oleh *International Public Sector Accounting Standards Board* (2011), mengatakan bahwa informasi yang disajikan pada akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangan memungkinkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka:

- a) Menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya entitas serta penyebaran sumber daya tersebut.
- b) Menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas.
- c) Pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas.

Selanjutnya, pada level yang lebih detail dalam *study* Nomor 14 tersebut dinyatakan bahwa pelaporan dengan basis akrual akan dapat:

- a) Menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas-aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan dananya.
- b) Memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai kewajiban-kewajiban dan komitmen-komitmennya.
- c) Menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya.

- d) Memberikan kesempatan pada pemerintah pada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya.
- e) Bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Menurut PSAP Nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan, manfaat penerapan akuntansi berbasis akrual secara spesifik untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan. Informasi yang mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah, dan ekuitas pemerintah, menyediakan informasi mengenai sumber alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan dalam menandai aktivitasnya. Dengan adanya penerapan standar akuntansi pemerintah untuk semua instansi pemerintahan diharapkan laporan keuangan yang disusun dapat seragam dan dapat menambah kualitas laporan keuangan pemerintah.

2.1.6. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan suatu sistem yang dirancang secara kompleks baik untuk pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah untuk menciptakan keandalan laporan keuangan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, pengamanan aset dan ketaatan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal dibangun dari lima komponen (PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) yaitu:

a) Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian menunjukkan suasana dalam sebuah organisasi yang mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orang dalam organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi bagi komponen lain dan sangat dipengaruhi oleh suasana yang diciptakan oleh orang-orang atas.

b) Penilaian resiko

Penilaian resiko merupakan mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola berbagai resiko dalam organisasi dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai.

c) Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian mencakup kebijakan dan prosedur untuk membantu meyakinkan bahwa semua tindakan dilaksanakan sesuai dengan arahan manajemen secara efektif.

d) Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi memungkinkan orang-orang dalam sebuah organisasi untuk saling memperoleh dan berbagi informasi

yang dibutuhkan untuk kepentingan pengelolaan, pelaksanaan dan pengendalian operasional.

e) Monitoring

Monitoring atau pengawasan merupakan proses penilaian terhadap kualitas dan efektivitas dari sistem pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan kontrol yang digunakan manajemen untuk mengevaluasi suatu kegiatan, peraturan, prosedur dan lain sebagainya.

Sistem pengendalian intern merupakan rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi dan mendorong untuk ditaatinya kebijakan-kebijakan dari manajemen. Komponen-komponen pengendalian internal dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen guna memastikan tujuan pengendalian dapat dicapai. Sistem pengendalian internal pemerintah dapat digunakan sebagai kontrol dalam mengelola suatu instansi. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik dan memadai mampu mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan karyawan dan manajemen.

2.2. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian kualitas laporan keuangan Puskesmas se Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Ifa Ratifah (2012)	Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	<i>Independen:</i> SAKD, Komitmen Organisasi <i>Moderator:</i> Komitmen Organisasi <i>Dependen:</i> Kualitas Laporan Keuangan	Regresi interaksi atau <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	SAKD, Komitmen organisasi berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan, Komitmen organisasi sebagai moderasi tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.
2	Emilda Ihsanti (2014)	Pengaruh Kompetensi SDM dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas LKPD	<i>Independen:</i> SDM, dan Sitem Akuntansi Keuangan Daerah. <i>Dependen:</i> Kualitas Laporan Keuangan	Analisis Regresi Berganda	SDM berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan SAKD tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3	Lilis Setyowati, Wikan Isthika (2014)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan	<i>Independen:</i> Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi SDM, dan	Analisis Regresi Berganda	SAKD tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. SDM dan internal audit berpengaruh signifikan

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		Kota Semarang	Peran Internal Audit. <i>Dependen:</i> Kualitas Laporan Keuangan		terhadap kualitas laporan keuangan. Semua variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.
4	Ni Made Sudiarianti, I Gusti Ketut Agung, I G.A. Budiasih (2015)	Pengaruh Kompetensi SDM pada Penerapan SPIP Dan SAP serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Independen:</i> Kompetensi SDM, Penerapan SPIP, dan Penerapan SAP. <i>Mediasi:</i> SAP dan SPIP <i>Dependen:</i> Kualitas LKPD	Analisis Statistik Inferensial	Kompetensi SDM berpengaruh positif pada penerapan SAP, SPIP dan Kualitas LKPD. Penerapan SPIP dan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
5	I Gusti Lanang Suamirka dan I Dewa Gede Dharma Suputra (2016)	Kemampuan Komitmen Organisasi, dan Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Kapasitas SDM dan Penerapan SIKD Pada Kualitas LKPD Kabupaten Karangasem	<i>Independen:</i> Kualitas SDM, Penerapan SIKD <i>Moderator:</i> Komitmen Organisasi, SPI <i>Dependen:</i> Kualitas Laporan Keuangan	Uji Nilai Selisih Mutlak dengan Regresi	Komitmen organisasi memperlemah pengaruh kapasitas SDM pada kualitas LKPD, sistem pengendalian intern memperkuat kapasitas SDM pada kualitas LKPD, komitmen organisasi memperkuat pengaruh SIKD pada kualitas LKPD, SPI tidak memoderasi pengaruh

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
					penerapan SIKD pada kualitas LKPD.
6	Ni Komang Yoni Rahayu, Ni Kadek Sinarwati, Made arie Wahyuni (2017)	Analisis Pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan TI, dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar	<i>Independen:</i> Profesionalisme, Pemanfaatan TI, Pengendalian Intern. <i>Dependen:</i> Kualitas Laporan Keuangan.	Analisis Regresi Berganda	Profesionalisme, pemanfaatan TI dan pengendalian intern berpengaruh signifikan pada terhadap Kualitas keuangan. Semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan dan positif pada Kualitas laporan keuangan.
7	Nurul Isnaini (2017)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara	<i>Independen:</i> Kompetensi SDM, Pemanfaatan TI, SAP, Pengendalian Intern. <i>Dependen:</i> Kualitas Informasi Laporan Keuangan	Regresi Berganda	Kompetensi SDM, SPI, pemanfaatan TI, dan SAP, berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan dan semua variabel independen secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.
8	Riedy Riandani (2017)	Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan TI, dan Pengendalian Intern	<i>Independen:</i> Kompetensi SDM, Pemanfaatan IT, Pengendalian Intern.	Uji Kualitas Data dan Uji Asumsi Klasik	Kompetensi SDM dan pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, pemanfaatan TI

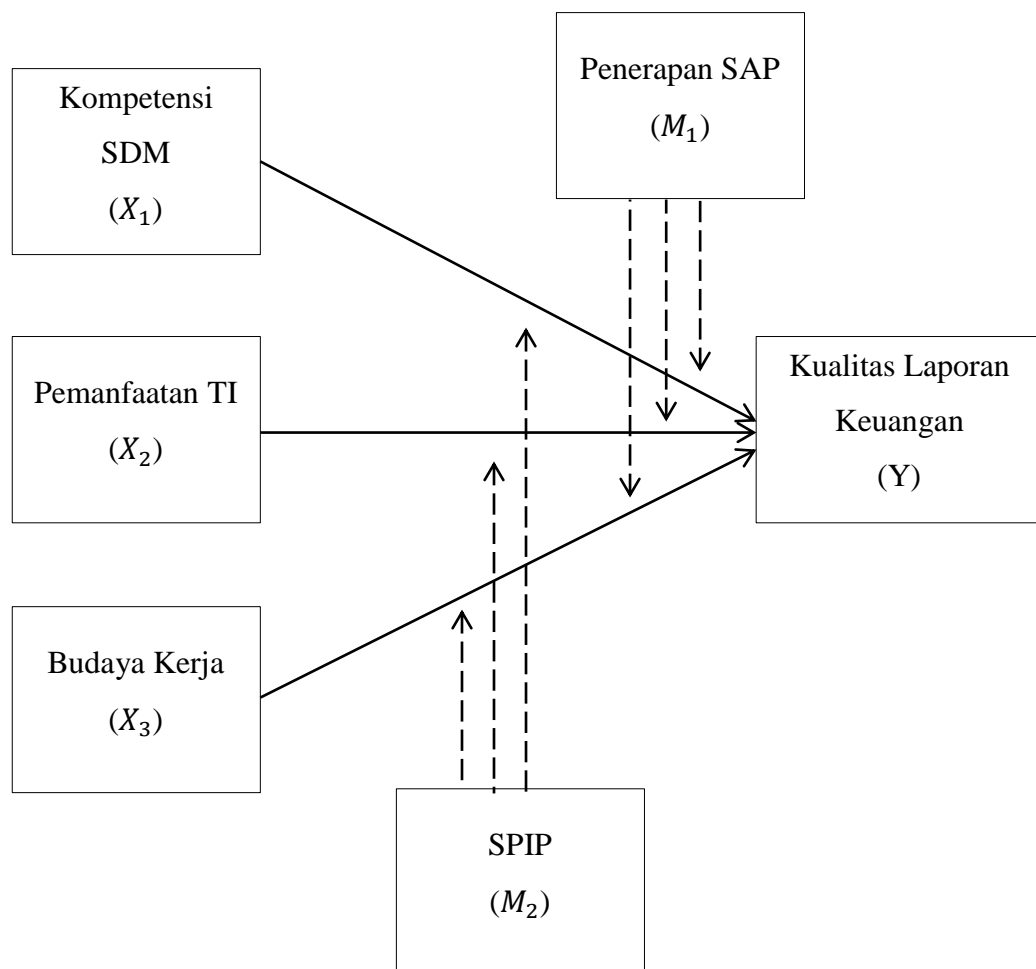
No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	<i>Dependen:</i> Kualitas Laporan Keuangan		tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan.

Sumber: Referensi Jurnal dan Skripsi

Penelitian ini memodifikasi model penelitian yang dilakukan oleh Ratifah (2012), Sudiarianti dkk (2015), Suarmika (2016) dan Isnaini (2017). Pemilihan variabel pada penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi secara umum variabel bebas menggunakan kompetensi SDM, pemanfaatan TI dimana variabel ini memiliki sumbangsih pengaruh yang besar terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penggunaan variabel budaya kerja diperoleh dari variabel komitmen organisasi yang merupakan turunan dari budaya kerja (Permenpan & RB RI No. 39 Tahun 2012 Tentang Pengembangan Budaya Kerja). Hal ini digunakan untuk memodifikasi penelitian karena dianggap sebagai hal yang penting dilingkungan kerja yang berpengaruh pada perilaku SDM yang nantinya akan berpengaruh juga terhadap kualitas laporan keuangan (Ratifah, 2012). Menurut penelitian yang dilakukan Ratifah, dikatakan bahwa komitmen organisasi jika dijadikan sebagai variabel bebas maka akan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Pada penelitian ini digunakan variabel pemoderasi yakni penerapan SAP dan SPIP dengan tujuan memperkuat pengaruh hasil variabel terikat dengan variabel bebas. Selain itu objek penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan Puskesmas se kabupaten Jepara.

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh positif antara variabel bebas yaitu kompetensi SDM, pemanfaatan TI, dan budaya kerja dengan ditengahi variabel moderasi penerapan SAP dan SPIP terhadap variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan. Kerangka pemikiran ini digunakan sebagai dasar pengembangan perumusan hipotesis.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis

2.4. Perumusan Hipotesis

Perumusan hipotesis menurut Darmawan (2014) merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara dikarenakan jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Hipotesis adalah suatu anggapan atau pendapat yang diterima secara tentatip (*a tentative statement*) untuk menjelaskan suatu fakta atau yang dipakai sebagai dasar bagi suatu penelitian. Hipotesis menurut Sanusi (2013) merupakan hasil pemikiran rasional yang dilandasi oleh teori, dalil, hukum dan lain sebagainya yang mendukung suatu pendapat tersebut. Hipotesis harus diuji berdasarkan data empiris yaitu data berdasar pada penelitian suatu sampel. Hasil pengujian hipotesis dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kesalahan yang diakibatkan dari pengambilan keputusan merupakan risiko dalam pengambilan keputusan. Agar suatu hipotesis dapat diuji, hipotesis harus dirumuskan secara jelas dan bersifat operasional.

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

2.4.1. Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Puskesmas

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi-fungsinya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien (Ihsanti, 2014).

Penelitian mengenai kompetensi SDM terutama dalam pengelolaan akuntansi pemerintah daerah kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan yang menghasilkan penelitian tentang kualitas laporan keuangan juga telah dilakukan oleh Ihsanti (2014), Setyowati (2014), Sudiarianti (2015), Isnaini (2017) dan Riandani (2017). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Kompetensi manusia yang baik menurut Suarmika (2016) adalah sumber daya manusia yang terampil, tanggungjawab, dan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai penyusunan laporan keuangan dan akuntansinya. Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kapasitas dan kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi sehingga hal tersebut akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan tidak memenuhi karakteristik yang disyaratkan. Dengan demikian tingginya kompetensi sumber daya manusia akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disusun.

Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat pengaruh positif antara kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan Puskesmas. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis:

H_1 : Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Puskesmas se kabupaten Jepara

2.4.2. Pengaruh Pemanfaatan TI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Puskesmas

Dalam PP Nomor 56 Tahun 2005 dan diperbarui dengan PP Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan serta memanfaatkan kemajuan informasi teknologi untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan dan menyalurkan informasi keuangan ke pelayanan publik. Kemajuan teknologi yang pesat dan potensi dalam pemanfaatannya luas, maka akan membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan secara cepat dan akurat.

Variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap laporan keuangan pada penelitian sebelumnya telah digunakan oleh Rahayu (2017) dan Isnaini (2017). Dalam penelitiannya, dikatakan bahwa pemanfaatan TI berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut Isnaini (2017), penggunaan TI oleh orang-orang berkompeten, jujur dan mematuhi standar pelaporan keuangan akan berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Semakin baik pengelolaan TI disuatu instansi, maka akan meningkatkan produktivitas dalam menjalankan tugas. Pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan, ketepatan hasil

jika digunakan dalam pengelolaan keuangan. Sehingga dengan hasil pemanfaatan TI dapat menambah kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat pengaruh positif antara pemanfaatan TI terhadap kualitas laporan keuangan Puskesmas. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis:

H_2 : Pemanfaatan TI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Puskesmas se kabupaten Jepara

2.4.3. Pengaruh Budaya Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Puskesmas

Suatu budaya yang kuat akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku anggota-anggotanya karena tingginya tingkat kebersamaan dan mampu menciptakan kendali pada perilaku anggotanya (Wahjono, 2010). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ratifah (2012) komitmen organisasi memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Budaya organisasi menurut Ratifah (2012) mengungkapkan dalam sebuah instansi dapat meningkatkan sistem akuntansi keuangan untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Komitmen organisasi sebagai sikap yang menunjukkan loyalitas terhadap instansi untuk mencapai kesuksesan dan tujuan instansi. Komitmen organisasi yang tinggi berpengaruh pada keberhasilan penerapan peraturan, undang-undangan, standar dan lain sebagainya seperti penerapan PP No 71 Tahun 2010 sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat pengaruh positif antara budaya kerja terhadap kualitas laporan keuangan Puskesmas melalui Penerapan SAP. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis:

H_3 : Budaya kerja berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Puskesmas se kabupaten Jepara.

2.4.4. Penerapan SAP Memoderasi Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Puskesmas

Dalam menyusun laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010, setiap instansi pemerintah termasuk Puskesmas memerlukan kualitas SDM yang memadai dimana SDM yang baik ini mampu memahami cara penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP yang meliputi pengakuan pendapatan, pengakuan belanja, prinsip-prinsip penghapusan asset berwujud dan tidak berwujud, kebijakan kapitalisasi penggunaan anggaran. Laporan keuangan puskesmas harus disiapkan oleh SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi atau keuangan yang memiliki pemahaman yang memadai terhadap sistem akuntansi pemerintahan.

Penelitian yang serupa telah dilaksanakan oleh Sudiarianti, dkk (2015). Dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa kompetensi SDM pada penerapan SAP memiliki nilai yang positif dan signifikan dan penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dan dalam penelitian tersebut dijelaskan juga, bahwa

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada penerapan SAP sebagai moderasi kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan.

SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penerapan SAP yang baik membutuhkan SDM yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan, pengakuan belanja, prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan, pengakuan pendapatan, penghapusan aset, kebijakan kapitalisasi pengeluaran, perhitungan persediaan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan siklus akuntansi dan penerapan standar akuntansi yang berlaku dalam pemerintahan. Sehingga, semakin tingginya kompetensi SDM maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Tanpa adanya SDM yang unggul, maka penerapan SAP cenderung tidak akan berjalan dengan baik (Suarmika, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut diduga penerapan SAP memoderasi pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan Puskesmas. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis:

H_4 : Penerapan SAP memoderasi pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan Puskesmas kabupaten Jepara.

2.4.5. Penerapan SAP Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan TI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Puskesmas

Menurut Pemandagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual dijelaskan bahwa, laporan keuangan yang baik disajikan dengan cepat dan tepat, sehingga perlu memperhatikan aturan-aturan, standar akuntansi yang berlaku dalam melakukan pencatatan, pengolahan data seperti perlunya menerapkan standar akuntansi pemerintah dalam aplikasi atau software teknologi yang dipakai agar hasil laporan keuangan tersebut dapat berguna, nyata dan dapat diandalkan. Sehingga pemanfaatan TI mampu memberikan kontribusi besar dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan tepat. Dengan pemanfaatan teknologi informasi juga mampu mempercepat pengolahan data terlebih dalam penyusunan laporan keuangan.

Penerapan TI yang digunakan sebagai pengelola keuangan Puskesmas dan pengelolaan keuangan haruslah menerapkan standar akuntansi pemerintah guna menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi semakin tinggi penerapan standar akuntansi pemerintah yang diterapkan pada pemanfaatan teknologi informasi untuk menyusun laporan keuangan, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan cenderung baik.

Berdasarkan uraian tersebut diduga penerapan SAP memoderasi pengaruh pemanfaatan TI terhadap kualitas laporan keuangan Puskesmas. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis:

H_5 : Penerapan SAP memoderasi pengaruh pemanfaatan TI terhadap kualitas laporan keuangan Puskesmas kabupaten Jepara.

2.4.6. Penerapan SAP Memoderasi Budaya Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Puskesmas

Dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi pemerintah merupakan hal yang paling penting dalam mencapai kualitas laporan keuangan yang memadai. Terbentuknya budaya kerja yang baik dilingkungan instansi mampu mencerminkan perilaku para anggotanya dan membentuk manusia yang produktif, kreatif, terampil, dan loyal terhadap instansi atau organisasinya (Wahjono, 2010). Budaya kerja mengarahkan perilaku anggotanya untuk disiplin dan mentaati peraturan yang ada. Tingginya budaya kerja yang dikembangkan mampu mempengaruhi perilaku anggotanya dalam melakukan setiap tugas yang dikerjakan. Dalam hal ini penerapan budaya kerja dalam sebuah instansi mengarahkan para sumber daya manusianya untuk menerapkan dan mematuhi standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga dengan terarahnya kerja yang demikian, akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian tersebut diduga penerapan SAP memoderasi pengaruh budaya kerja terhadap kualitas laporan keuangan Puskesmas. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis:

H_6 : Penerapan SAP memoderasi pengaruh budaya kerja terhadap kualitas laporan keuangan Puskesmas kabupaten Jepara.

2.4.7. SPIP Memoderasi Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Puskesmas

Sudiarianti (2015) menjelaskan efektivitas pengendalian internal oleh sumber daya manusia atas keandalan pelaporan keuangan dilaksanakan melalui pencegahan dan deteksi kecurangan. Hasil pelaporan keuangan akan lebih andal dan berkualitas jika sebuah instansi menerapkan dan mematuhi sistem pengendalian internal pemerintah atas pelaporan keuangan. Menurut Mardiasmo (2009), sistem pengendalian internal digunakan untuk menjamin bahwa strategi, aturan-aturan dalam mencapai tujuan instansi dijalankan secara ekonomis, efisien dan efektif. Dengan adanya pengendalian internal yang demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang terintegrasi, mampu mendorong sumber daya yang ada untuk menerapkan aturan, strategi yang telah dirancang dalam pencapaian tujuan organisasi. Perilaku SDM yang telah dipengaruhi oleh SPIP akan berdampak pada penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dapat memenuhi empat karakteristik yang disyaratkan yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sudiarianti (2015) dan Suarmika (2016) dan dengan variabel yang sama menunjukkan bahwa dengan moderasi SPIP pada hubungan kompetensi SDM pada kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh yang positif. Hal ini berarti semakin tinggi kompetensi SDM yang dimiliki suatu instansi melalui

penerapan SPIP, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan instansi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diduga SPIP memoderasi pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan Puskesmas. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis:

H_7 : SPIP memoderasi pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan Puskesmas kabupaten Jepara.

2.4.8. SPIP Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan TI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Puskesmas

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP berguna untuk mengevaluasi setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan didalam instansi tersebut termasuk dalam pemanfaatan TI. Pengendalian atas pemanfaatan TI dalam sebuah organisasi perlu dilakukan guna menunjang pekerjaan dan mendorong untuk kerja yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, SPIP juga membuat pemanfaatan TI menjadi lebih terarah dan terkoordinir dengan baik sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang baik dan informatif. Semakin baiknya pengendalian atas pemanfaatan teknologi informasi dalam sebuah instansi, maka mampu meminimalisir adanya kecurangan dan ketidaksesuaian dalam penyampaian informasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan (Jogiyanto, 2008).

Berdasarkan uraian tersebut diduga SPIP memoderasi pengaruh pemanfaatan TI terhadap kualitas laporan keuangan Puskesmas. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis:

H_8 : SPIP memoderasi pengaruh pemanfaatan TI terhadap kualitas laporan keuangan Puskesmas kabupaten Jepara.

2.4.9. SPIP Memoderasi Pengaruh Budaya Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Puskesmas

COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang dipengaruhi oleh dewan entitas direksi manajemen dan personil lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan pada efektivitas dan efisiensi operasional keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lainnya yang berlaku (Isnaini, 2017).

Menurut COSO dalam Sawyer, dkk (2009) perlunya pengendalian untuk mengevaluasi nuansa pada puncak organisasi, etika, kompetensi kebijakan SDM bahkan budaya dalam organisasi tersebut. Pengendalian atas budaya yang terintegrasi mampu mengarahkan budaya kerja dalam sebuah instansi dapat dikendalikan dan diarahkan sesuai dengan tujuan organisasi. Sehingga hal ini akan berdampak baik terhadap penyusunan laporan keuangan karena pengendalian budaya mampu membentuk karakteristik SDM dan selanjutnya SDM menjadi patuh dan loyal terhadap instansi.

Pengendalian internal atas penerapan budaya kerja juga perlu dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa budaya kerja di sebuah instansi benar-benar dijalankan dan memberikan pengaruh positif untuk tujuan organisasi atau instansi dan pengendalian internal mampu mempengaruhi bentuk budaya kerja yang diterapkan dalam sebuah instansi (Tampubolon, 2008). Dengan adanya pengendalian atas budaya kerja, maka akan berdampak pada para pelakunya dalam penyusunan laporan keuangan yang memenuhi empat karakteristik laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan uraian tersebut diduga SPIP memoderasi pengaruh budaya kerja terhadap kualitas laporan keuangan Puskesmas. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis:

H_9 : SPIP memoderasi pengaruh budaya kerja terhadap kualitas laporan keuangan Puskesmas kabupaten Jepara.